



RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Komunikasi informatika sebagai sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan komunikasi dan informatika tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Dalam Penyajian ini kami telah berupaya untuk dapat menyusunnya dengan baik dan semaksimal mungkin, namun segala keterbatasan yang dimiliki sehingga mungkin hasil yang dapat di capai belum seperti yang diharapkan.

Atas segala kekurangan tak lupa dimohon maaf dan semoga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat bagi kita semua.

Disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Kami menyadari penyusunan Rencana Strategi ini masih banyak kekurangan.

Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, September 2025

Kepala Dinas,


H. BACHTIAR, S.Hi.M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I

N

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.2.1 Sumberdaya Manusia	II-17
2.1.2.2 Sumberdaya Asset/Modal.....	II-18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
2.1.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah	II-20
2.1.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	II-26
2.1.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	II-39
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-41
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	II-41
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-41
2.1.2 Isu Strategis	II-42

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	III-

2BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN	V-1
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan.....	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan.....	IV-18
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	IV-20
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	IV-20

BAB V

PENUTUP	V-1
----------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidenreng Rappang I-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW, dan RPJPD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 dilandasi pada beber

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi publik, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta penyelenggaraan e-Government. Tugas utama Diskominfo adalah:

- Merumuskan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- Menyediakan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat.
- Mengembangkan dan mengelola infrastruktur TIK di lingkungan pemerintah daerah.
- Menyediakan sistem dan aplikasi pelayanan publik berbasis digital.
- Menjamin keamanan informasi dan data pemerintah daerah.

Rancangan awal Renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 menyajikan analisis permasalahan, isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdasarkan sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Renstra Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik dan Persandian di Kabupaten Sidenreng Rappang sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode dimaksud dengan mencantumkan rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif berdasarkan strategi dan kebijakan yang terdapat di Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 20125 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi kabupaten Sidenreng Rappang ‘ **Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera**’ dan Misi 6 “ **Meningkatkan tata Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital**” sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Renstra ini disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya rancangan awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini antara lain:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan awal Renstra mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan demikian maka dokumen rancangan awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
- d. Kelompok sasaran layanan .

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah .

2. Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam rangka penyesuaian perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mencabut peraturan sebelumnya.

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang idang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Dinas sesuai dengan bidang idang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang humas, informasi dan komunikasi, Bidang Aplikasi informatika dan statistik, Bidang Pesandian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Dinas sesuai dengan bidang komunikasi dan Informatika; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas meliputi sebagai berikut :

- a. Merencanakan Program Kerja Lingkup Dinas Komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksana tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - g. Merumuskan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian;
 - h. Melaksanakan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian;
 - i. Melaksanakan evaluasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang persandian;
 - k. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dipimpin yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - d. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Sekretaris meliputi sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. Mengoordinasikan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- j. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- u. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Uraian Tugas Subbagian Perencanaan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- g. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- h. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- i. Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun SOP administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;

- m. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
2. Subbagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.

Uraian Tugas Subbagian Keuangan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan administrasi gaji dan tunjangan ASN;
- g. Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;
- i. Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- j. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
- k. Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- l. Melakukan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- m. Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. Menyusun daftar dan laporan inventarisasi barang;
- o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan;

- p. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

Uraian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - o. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
 - p. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - q. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - r. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
 - s. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
 - t. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - u. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
3. Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Uraian tugas Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
 - g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah;
 - j. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - k. melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - l. melaksanakan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
 - m. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - n. melaksanakan penyediaan akses informasi;
 - o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kehumasan, informasi dan komunikasi;
 - p. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang merencanakan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
- d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- g. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi;
- j. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- k. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- l. melaksanakan layanan keamanan informasi *e-Government*;

- m. melaksanakan layanan manajemen data dan informasi e-govermen
- n. melaksanakan layanan pengembangan dan oengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- o. mengintegrasikan layanan publik dan pemerintahan;
- p. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smarct city;
- q. melaksanakan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten;
- r. melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat;
- s. melaksanakan layanan domain dan sub domain bagi lembaga;
- t. melaksanakan penyusunan komplikasi produk statistic sektoral;
- u. melaksanakan koordinasi data statistic sektoral bidang social, ekonomi, politik dan HAM;
- v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang aplikasi informatika dan statistik;
- w. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.bahan perumusan kebijakan; dan

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang persandian dan keamanan informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
- e. pematauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian dan keamanan informasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Persandian meliputi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, komunikasi sandi, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- h. melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi;
- i. melaksanakan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
- j. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian diseluruh perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi Pembina Persandian;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perindustrian;
- n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perindustrian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

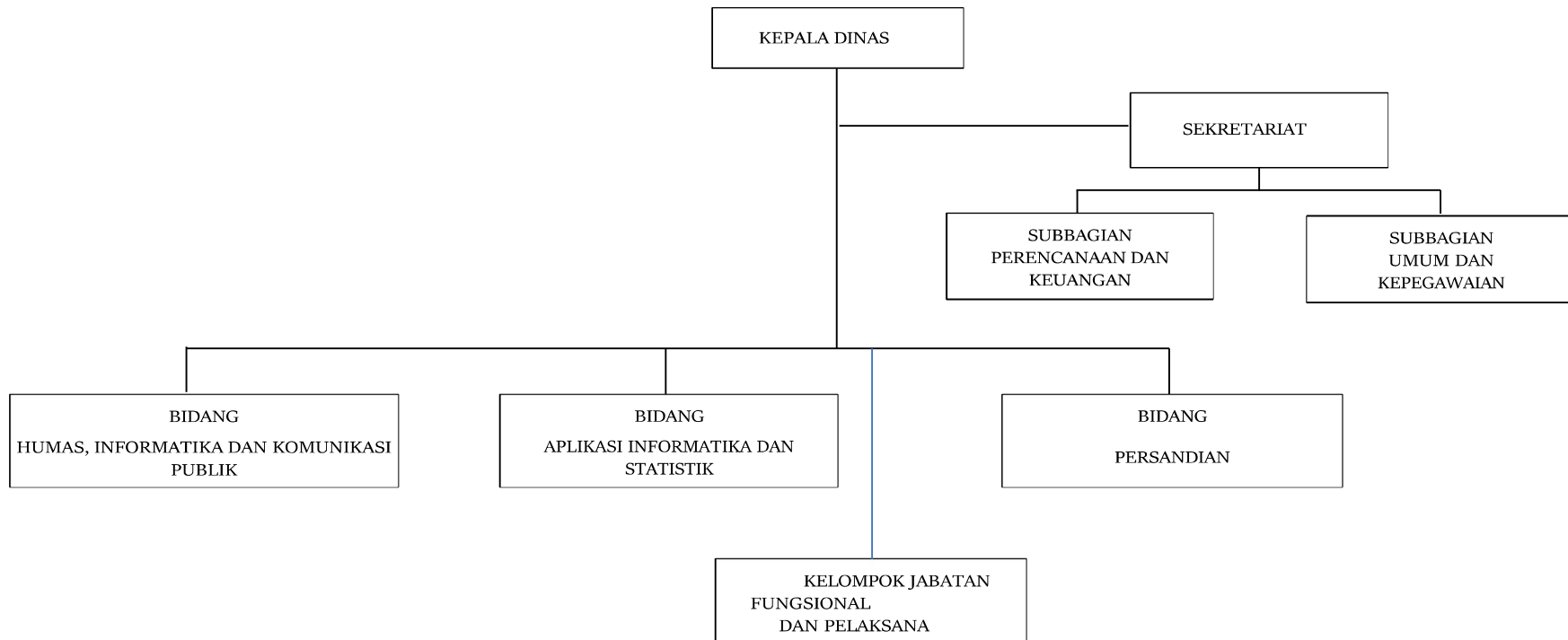
Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2023,

maka Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - i. Subbagian Perencanaan;
 - ii. Subbagian Keuangan;
 - iii. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik
- e. Bidang Persandian
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.1.2.1 Sumberdaya Manusia

Dilihat dari segi sumberdaya manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki pegawai dalam jumlah yang mencukupi. Artinya, dengan komposisi kepegawaian yang ada sekarang (data pegawai per 31 Desember 2024), tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang belum dapat berjalan secara optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada saat ini berjumlah 21 orang terdiri dari laki-laki berjumlah 12 orang dan perempuan berjumlah 9 orang, dengan rincian 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	12	9	21
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	0	0	0
	Jumlah	12	9	21

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

Ditinjau dari golongan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 7 orang pada golongan IV, 13 orang pada golongan III dan 1 orang pada golongan II.

Ditinjau dari segi pendidikan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 7 orang Strata 2, 12 orang Strata 1, 1 (satu) orang Diploma dan 1 (satu) orang dengan pendidikan SMA/Sederajat.

Data ASN berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	5	2	7
2	Golongan III	6	7	13
3	Golongan II	1		1
	Jumlah	13	9	21

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Tabel 2.3
Klasifikasi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	3	4	7
2	Strata 1	7	5	12
3	Diploma 3	1		1
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	1		1
	Jumlah	12	9	21

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025

2.1.2.2 Sumberdaya Asset/Modal

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah gedung kantor seluas 1.096 m², kendaraan dinas operasional sebanyak unit, terdapat pula aset berupa alat perlengkapan kantor dan aset tetap lainnya di luar gedung dan peralatan mesin.

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024, adalah sebagaimana tabel aset yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

NOMOR	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	2	Kurang Baik
	Kebawah)		
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	2	Baik
	Kebawah)		
5	Sepeda Motor	1	Kurang Baik
6	Sepeda Motor	1	Kurang Baik
7	Sepeda Motor	6	Baik
12	Mesin Ketik Listrik	1	Baik
13	Lemari Kayu	1	Rusak Berat
15	Lemari Kayu	3	Kurang Baik
16	Lemari Kayu	1	Baik
17	Rak Besi	1	Kurang Baik
18	Rak Besi	1	Baik
19	Filing Cabinet Besi	1	Kurang Baik
20	Filing Cabinet Besi	1	Baik
21	Brandkas	1	Baik
22	White Board	1	Baik
23	Alat Kantor Lainnya	56	Baik
29	Meja Kerja Kayu	2	Baik
30	Meja Rapat	1	Baik
31	Meja Resepsionis	1	Baik
32	Kursi Rapat	12	Baik
33	Kursi Tamu	1	Kurang Baik
34	Kursi Putar	2	Rusak Berat
35	Kursi Putar	1	Baik
36	Kursi Putar	3	Baik
37	Kursi Putar	1	Kurang Baik
38	Bangku Tunggu	2	Kurang Baik
39	Sofa	1	Kurang Baik
40	Meubeleur lainnya	1	Rusak Berat
41	Lemari Es	1	Rusak Berat
42	Lemari Es	1	Baik
43	A.C. Window	1	Baik
44	A.C. Window	1	Kurang Baik
45	A.C. Split	6	Baik
48	A.C. Split	1	Kurang Baik

49	A.C. Split	7	Baik
50	A.C. Split	1	Rusak Berat
53	Televisi	1	Kurang Baik
55	Televisi	4	Baik
56	Camera Video	1	Rusak Berat
57	Tangga Aluminium	2	Baik
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Baik
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Kurang Baik
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Kurang Baik
63	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Kurang Baik
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Kurang Baik
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Kurang Baik
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
68	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
69	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
70	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Kurang Baik
71	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	Baik
72	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Rusak Berat
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Kurang Baik
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
79	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik
80	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	Baik
81	Kursi Tamu di	1	Baik

	Ruangan Pejabat		
	Eselon II		
82	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	1	Kurang Baik
	Eselon III		
83	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	1	Baik
	Dinamis		
84	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	4	Baik
	Dinamis		
85	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	1	Baik
	Dinamis		
86	Buffet Kayu	1	Baik
87	Microphone/Wireless MIC	2	Baik
88	Camera Electronic	1	Rusak Berat
89	Camera Electronic	1	Rusak Berat
90	Camera Electronic	1	Kurang baik
91	Camera Electronic	1	Kurang baik
92	Video Mixer	1	Rusak Berat
93	Video Mixer	1	Rusak Berat
94	Lensa Kamera	1	Rusak Berat
95	Lensa Kamera	1	Kurang baik
96	Lensa Kamera	1	Kurang baik
97	Lensa Kamera	1	Kurang Baik
98	Camera Digital	1	Rusak Berat
99	Alat Studio Video Lainnya	1	Rusak Berat
100	Pesawat Telephone	2	Baik
101	Handy Talky (HT)	2	Baik
102	Facsimile	1	Baik
103	Mast Tower	1	Baik
104	switcher/menara antena lainnya (dst)	4	Baik
105	Genset	1	Baik
106	Stabilizer/UPS	1	Baik
107	Stabilizer/UPS	15	Rusak Berat
108	Stabilizer/UPS	25	Baik
109	Mainframe (Komputer Jaringan)	4	Baik
110	P.C Unit	2	Rusak Berat
111	P.C Unit	1	Rusak Berat
112	P.C Unit	2	Baik
113	P.C Unit	2	Baik

114	P.C Unit	2	Baik
115	P.C Unit	2	Baik
116	P.C Unit	1	Baik
117	P.C Unit	1	Baik
118	P.C Unit	1	Baik
119	P.C Unit	1	Baik
120	P.C Unit	2	Baik
121	Lap Top	2	Rusak Berat
122	Lap Top	1	Baik
123	Lap Top	1	Baik
124	Lap Top	3	Baik
125	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik
126	Monitor	2	Baik
127	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
128	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Baik
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Berat
134	External/ Portable Hardisk	3	Baik
135	External/ Portable Hardisk	2	Baik
136	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	Baik
137	Server	1	Baik
138	Server	2	Baik
139	Router	7	Rusak Berat
140	Router	33	Baik
141	Router	1	Baik
142	Hub	1	Baik
143	Hub	1	Baik
144	Hub	40	Baik
145	Hub	1	Baik
146	Modem	6	Baik
147	Wireless Access Point	12	Rusak Berat
148	Wireless Access Point	58	Baik
149	Wireless Access Point	5	Baik
150	Peralatan Jaringan lainnya	4	Baik
151	Peralatan Jaringan lainnya	1	Baik
152	Peralatan Jaringan	1	Baik

	lainnya		
153	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2018-2023 dan Tahun 2024-2026, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.1.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja dari Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra 2024-2026.

Capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2020-2024, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja IKU dan IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator permendagri 86,18, dan SPM																		
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)																		
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)								2.25	2.13	1,78	2.32	2.87	3.04	50	50	50	50	135%
	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Kerjasama media yang dikelola				50	57	79	100	100	50	57	79	100	64,45	100	100	100	100	64,45
	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet				75.74%	78.47%	83.87%	89.02%	85.78	74,4	77,05	77,05	88,03	87,7	98,2%	98%	92%	99%	99%
	predikat Nilai SAKIP				CC	CC	CC	CC	B	C	CC	CC	CC		C	C	CC	CC	
	Persentase Data statistik yang dipublikasikan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah								100					50					50
	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik								2					2					100

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NO	Urairan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	IKK																		
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					100	100	100	100		78	82	88	89		78	82	88,00	89,00
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						75	100	100	75	100	75	100				100	100%	100%
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						110	100	100			100	100	100			100	100%	100%
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						100	100	100			100	100	100			100	100%	100%
5	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah						46	66	65			37,52	55.19	55.97			81,57	83,62	86%

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

URAIAN	Anggaran pada tahun ke...					Realisasi Anggaran pada tahun ke...					Rasio antara realisasi dan					Rata-rata pertumbuhan	
	(x Rp. 1000)					(x Rp. 1000)					Anggaran Tahun ke.....					(x Rp. 1000)	
	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PENDAPATAN	392.740.000	476.423.000	476.423.000			443.766.000	446.250.000	463.636.000			112,99	93,67	97,32			1.345.586.000	1.353.652.000
Pendapatan Asli Daerah																-	
BELANJA DAERAH																-	
Belanja Tdk Langsung	2.245.670.000	2.197.378.000	2.197.378.000	2.057.179.000	2.136.655.000	2.223.729.495	2.107.439.976	2.161.966.004	1.998.958.733	2.113.159.304	99,02	95,91	98,39	97,17	98,90	10.834.260.000	10.605.253.512
Belanja Langsung	6.115.794.000	4.079.916.000	4.079.916.000	4.379.040.000	2.866.060.000	6.012.088.620	3.580.626.376	3.956.295.790	818.380.822	2.830.475.261	98,30	87,76	96,97	18,69	98,76	21.520.726.000	17.197.866.869

2.1.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.2.1 Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Terkait dengan hal diatas maka peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika sangatlah penting di dalam mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan perubahan dinamika masyarakat. Maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan E-Government yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2.1.3.2.2 Urusan Statistik

Penyelenggaraan Urusan Statistik dilaksanakan Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang . Data statistik daerah sangat berguna sebagai bahan perencanaan daerah dan juga termasuk data PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang sangat berguna untuk menganalisis ekonomi makro daerah. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu Tahun 2025-2029

2.1.3.2.3 Urusan Persandian

Urusan Persandian diselenggarakan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan persandian terutama terkait pengamanan informasi internal perangkat Daerah dan pengamanan sistem jaringan informasi ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah, hal ini karena adanya perubahan fungsi dan penerapan sistem

pengelolaan dan layanan operasional persandian. Dulu layanan operasional persandian hanya difokuskan pada pengamanan informasinya saja, namun sekarang disamping informasi juga harus mengamankan sistem jaringan informasi, sehingga bagi petugas persandian saat ini juga dituntut harus memahami dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu masyarakat dan Seluruh Perangkat Daerah

2.1.4. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dinas Kominfo tidak bekerja sendiri, tetapi menjadi *enabler* dan *fasilitator* dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik, serta penguatan infrastruktur digital. Oleh karena itu, mitra perangkat daerah yang terlibat secara aktif antara lain: seluruh OPD

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang. Permasalahan penyelenggaraan pangan menjelaskan perbedaan hasil penyelenggaraan pangan yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan dari Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025- 2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dirumuskan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari tiga urusan urusan yaitu Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum tersosialisasikannya ke Masyarakat Layanan Aduan
Seperti SPAN Lapor, Baruga dan SIAPP
2. Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Kurang Optimalnya Produksi Informasi Pemerintah berupa berita dan Video sinematik
4. Perkominfo No.8/PER/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
5. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
6. Optimalisasi Layanan Aduan Masyarakat
7. Masih kurangnya Infrastruktur Jaringan TIK
8. Bandwidth Internet belum mencukupi kebutuhan pemerintah
9. Kurangnya Fasilitas pusat data (Server)
10. Aplikasi yang digunakan belum terintegrasi dengan aplikasi pemerintah pusat
11. Belum adanya Master Plan Kota Cerdas
12. Kurangnya SDM bidang TIK

Sedangkan permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Statistik antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dibidang statistik
2. Kurangnya infrastruktur penyelenggaraan statistik

Sedangkan permasalahan yang teridentifikasi pada Urusan Persandian antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi tata cara penggunaan sertifikat elektronik
2. Kurangnya penggunaan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Sertifikasi Elektronik dari BSR E
3. Jumlah pengguna atau pegawai yang memiliki akun sertifikasi digital masih rendah
4. Belum terpusatnya pengelolaan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing OPD
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki skill baik di bidang teknologi informasi maupun keamanan informasi
6. Rendahnya jumlah SDM yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknologi Informasi (TI).

RANCANGAN RENSTRA Tahun 2025-2029

Lampiran 5
Form 5

Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kabupaten Sidenreng Rappang : 2025 : Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik				
Tujuan Strategis		: Urusan Komunikasi dan Informatika				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Komunikasi dan Informatika				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II Risiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	Infrastruktur jaringan yang tidak memadai.	RSO.25.02.19.16.01	12	Kepala Dinas	Penyediaan bandwidth internet yang belum memenuhi kebutuhan	Pekerjaan yang menggunakan akses internet di OPD terganggu dan terlambat
III Risiko Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	Ketergantungan teknologi	ROO.25.03.19.16.01	2	Kabid Humas	Semua layanan dialihkan ke sistem online tanpa alternatif offline	Warga yang tidak memiliki akses internet atau tidak melek digital jadi terpinggirkan
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah tidak terlaksana dengan baik	ROO.25.03.19.16.02	2	Kabid Humas	Kurangnya informasi yang akan disebarakan	Kegiatan Pemerintah Daerah tidak terpublikasi secara luas
3	Tidak ada distribusi informasi yang intens melalui media cetak dan online	ROO.25.03.19.16.03	12	Kabid Humas	Tidak adanya mitra Pemerintah Daerah dengan Media Massa	Kegiatan Pemerintah Daerah tidak terpublikasikan secara luas
4	Masyarakat belum optimal dalam menggunakan saluran pelayanan pengaduan	ROO.25.03.19.16.04	12	Kabid Humas	Masyarakat belum Sepenuhnya Mengetahui Prosedur dan tata cara penggunaan saluran	Kurangnya Masyarakat yang Menggunakan Saluran Aduan yang disediakan Pemerintah
5	Terjadinya Mis informasi, yang tidak efektif dan cenderung kontra terhadap kebijakan pemkab	ROO.25.03.19.16.05	12	Kabid Humas	Tidak adanya referensi informasi publik yang benar dan akurat	Masyarakat kurang menerima informasi publik yang maksimal
6	Ketimpangan akses dan kualitas layanan digital antar OPD.	ROO.25.03.19.16.01	2	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Terhambatnya pertukaran data dan integrasi antar OPD.	Koordinasi Pemerintahan Terhambat
7	Sarana dan prasarana TIK tidak berfungsi dengan baik atau rusak	ROO.25.03.19.16.02	2	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Sarana dan Prasarana TIK sudah lama digunakan dan ketinggalan teknologi	Pelaksanaan kegiatan pemerintah berbasis elektronik tidak optimal
8	Belum optimalnya pengelolaan aplikasi informatika dan pengembangan aplikasiPemda	ROO.25.03.19.16.03	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Kurangnya Koordinasi antar OPD sehingga Penyelenggaraan SPBE Belum maksimal	Nilai Indeks SPBE Belum maksimal
9	Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemda	ROO.25.03.19.16.03	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang TIK belum memenuhi kebutuhan	Penggunaan aplikasi layanan sering mengalami gangguan / error dan kinerja layanan pemda terganggu
10	Penyelenggaraan kendali data pemda belum terintegrasi dengan pusat data nasional	ROO.25.03.19.16.04	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Belum adanya sistem penghubung layanan pusat data pemda dengan pusat data nasional	Aplikasi layanan pemerintah daerah tidak maksimal
11	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemda	ROO.25.03.19.16.05	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang TIK belum memenuhi kebutuhan	Penggunaan aplikasi layanan sering mengalami gangguan / error dan kinerja layanan pemda terganggu
12	Penyelenggaraan jaringan intra pada belum optimal di OPD	ROO.25.03.19.16.06	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	1. Infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah tidak terupgrade 2. Bandwith yang digunakan tidak sesuai kebutuhan	Aplikasi layanan pemerintah daerah tidak maksimal
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas						

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

Form 5
Lampiran 5
Form 5

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Kabupaten Sidenreng Rappang				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Komunikasi dan Informatika				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	Akses internet lambat	RSO.25.00.16.02	12	Kepala Dinas	Penyediaan bandwidth internet yang belum memenuhi kebutuhan	Pekerjaan yang menggunakan akses internet di OPD terganggu dan terlambat
II Risiko Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	Sarana dan prasarana TIK tidak berfungsi dengan baik atau rusak	ROO.25.00.16.01	2	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Sarana dan Prasarana TIK sudah lama digunakan dan ketinggalan teknologi	Pelaksanaan kegiatan pemerintah berbasis elektronik tidak optimal
2	Belum optimalnya pengelolaan aplikasi informatika dan pengembangan aplikasi Pemda	ROO.25.00.16.02	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Kurangnya Koordinasi antar OPD sehingga Penyelenggaraan SPBE Belum maksimal	Nilai Indeks SPBE Belum maksimal
3	Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemda	ROO.25.00.16.03	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang TIK belum memenuhi kebutuhan	Penggunaan aplikasi layanan sering mengalami gangguan / error dan kinerja layanan pemda terganggu
4	Penyelenggaraan kendali data pemda belum terintegrasi dengan pusat data nasional	ROO.25.00.16.04	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Belum adanya sistem penghubung layanan pusat data pemda dengan pusat data nasional	Aplikasi layanan pemerintah daerah tidak maksimal
5	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemda	ROO.25.00.16.05	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang TIK belum memenuhi kebutuhan	Penggunaan aplikasi layanan sering mengalami gangguan / error dan kinerja layanan pemda terganggu
6	Penyelenggaraan jaringan intra pada belum optimal di OPD	ROO.25.00.16.06	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	1. Infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah tidak terupgrade 2. Bandwith yang digunakan tidak sesuai kebutuhan	Aplikasi layanan pemerintah daerah tidak maksimal
7	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi situs pemerintah daerah	ROO.25.00.16.07	12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	Kurangnya koordinasi antar instansi sehingga data terkait instansi yang tersedia di situs web pemerintah daerah masih terbatas	Updating monitoring data website kurang optimal
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas						

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Kabupaten Sidenreng Rappang				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Statistik				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	Data / informasi yang tersedia kurang atau tidak lengkap	RSO.25.00.20.01	12	Kepala Dinas	Tidak semua OPD memiliki sistem pencatatan Data	Pengambilan keputusan berbasis data sulit dilakukan
III	Risiko Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	Kurangnya data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	ROO.2.20.12.25.0 1	6	Kabid Aplikasi Informatika dan	Belum optimalnya OPD menggunakan data statistik untuk perencanaan evaluasi dan penyusunan	Kurangnya data pendukung dalam pengambilan kebijakan pemda
2	Belum optimalnya OPD menggunakan data statistik untuk perencanaan evaluasi dan penyusunan kebijakan	ROO.2.20.12.25.0 2	6	Kabid Aplikasi Informatika dan	Belum optimalnya OPD menggunakan data statistik untuk perencanaan evaluasi dan penyusunan	Penyusunan perencanaan dan kebijakan tidak tepat sasaran
3						

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Kabupaten Sidenreng Rappang				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan informasi				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Persandian				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II Risiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	Minimnya kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi elektronik	RSO.25.00.21.01	12	Kepala Dinas	Penyediaan bandwidth internet yang belum memenuhi kebutuhan	Pekerjaan yang menggunakan akses internet di OPD terganggu dan terlambat
III Risiko Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	kurangnya minat Perangkat Daerah dalam pemanfaatan layanan keamanan informasi	ROO.25.00.21.01	5	Kepala Bidang Persandian	Kurangnya informasi yang akan disebarakan	Kegiatan Pemerintah Daerah tidak terpublikasi secara luas
2	Masih kurangnya payung hukum sebagai dasar utama penyusunan kebijakan keamanan informasi	ROO.25.00.21.02	10	Kepala Bidang Persandian	Perubahan dari lembaga sandi negara menjadi badan siber dan sandi negara	Belum tersedianya dokumen perencanaan di Bidang keamanan informasi
3	Kurangnya personil persandian yang telah mengikuti pendidikan dan dilkat sandi	ROO.25.00.21.03	10	Kepala Bidang Persandian	Waktu pendidikan dan diklat yang terlalu lama	Kurangnya personil sandi di Bidang Persandian
4	Kurangnya Pengamanan informasi Pemerintah Daerah	ROO.25.00.21.04	5	Kepala Bidang Persandian	Pengamanan informasi masih memerlukan peran BSSN dalam membantu pengamanan Informasi	Kurangnya koordinasi dengan pihak BSSN dalam rangka penjaminan keutuhan informasi
5	Minimnya minat pimpinan dalam pemanfaatan layanan keamanan informasi	ROO.25.00.21.05	5	Kepala Bidang Persandian	Pimpinan masih merasa masih aman saja selama ini	Sistem layanan keamanan informasi tidak berjalan maksimal
6	Kerusakan sarana dan prasarana	ROO.25.00.21.06	5	Kepala Bidang Persandian	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana	Sarana dan Prasarana tidak berfungsi secara maksimal
7						
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas						

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
No.	Nama Risiko	Skala Risiko	Penyebab Risiko	Rencana Mitigasi		
				Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Tidak Maksimal dalam melakukan survey dilapangan dalam penyusunan dokumen perencanaan Teknis	7	Penysunan dokumen perencanaanTeknis tidak melibatkan ahlinya	Budaya kerja yang tidak Profesional	Februari - Mei	Bidang Aplikasi informatika dan Statistik, Bidang Humas
	Manipulasi kegiatan	14	ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku	Budaya kerja yang kurang baik	Mei- September	Bidang Aplikasi informatika dan Statistik, Bidang Humas
	Memalsukan bukti dan laporan pekerjaan akhir yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban.	7	Kelalaian PPK dan PPTK dalam menerima hasil pekerjaan	Kerugian keuangan negara	September - Desember	Bidang Aplikasi informatika dan Statistik, Bidang Humas

3. Isu Strategis

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik dan teknologi informatika.
2. Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
3. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
4. Maraknya Berita Hoaks
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerahpersandian
6. Perkembangan TeknologiInformasi
7. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi dan informasi.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KPMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KET
1	2	3	4	5
		Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif berbasis teknologi digital melalui penyederhanaan proses birokrasi, penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Pengembangan sistem administrasi pemerintahan terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penguatan mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan inovatif	Penerapan Layanan SPBE di Instansi Pemerintah SDM yang memadai dan memiliki kompetensi IT terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif bagi pemerintah desa / kelurahan ketersediaan SDM yang memadai panduan dan prosedur tata kelola keamanan sistem informasi berbasis elektronik yang sesuai standar Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERMASALAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ISU KLES YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Ketersediaan jaringan internet (fiber optik, VSAT, radio link) di wilayah perkotaan hingga pedesaan.	Masih kurangnya Infrastruktur Jaringan TIK	Masih terdapat wilayah blank spot atau keterbatasan sinyal internet , terutama di daerah pedesaan dan pelosok.				Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik dan teknologi informatika.
Pusat Data (Data Center) milik pemerintah daerah atau kerja sama dengan pusat data	Bandwidth Internet belum mencukupi kebutuhan pemerintah	Banyak aparatur desa/OPD yang belum terbiasa menggunakan sistem informasi				
Potensi pengembangan Command Center dan infrastruktur pendukung Smart City.	Kurang Optimalnya Produksi Informasi Pemerintah berupa berita dan Video sinematik	Belum semua OPD aktif dan responsif dalam layanan informasi melalui PPID.				Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
Ketersediaan data sektoral OPD dan statistik daerah sebagai bahan baku sistem informasi dan kebijakan publik.	Perkominfo No.8/PER/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga	Banyak masyarakat tidak mengetahui haknya atas informasi publik.				Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
Potensi penguatan Portal Satu Data Daerah dan Open Data untuk keterbukaan informasi	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dibidang statistik	Rendahnya Kualitas dan Konsistensi Data Statistik Sektoral				Pengamanan Informasi Pemerintah Daerahpersandian
	Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki skill baik di bidang teknologi	Peningkatan ancaman peretasan, pencurian data, dan kebocoran informasi publik.				Perkembangan Teknologi Informasi
	Kurangnya sosialisasi tata cara penggunaan sertifikat elektronik	Minimnya SOP keamanan sistem informasi pada perangkat daerah.				Pengamanan Informasi Pemerintah Daerahpersandian
	Kurangnya penggunaan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Sertifikasi	integrasi sistem informasi pemerintahan daerah dengan Sertifikat Elektronik dari BSR E				Perkembangan Teknologi Informasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi kabupaten Sidenreng Rappang ‘ **Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera**’ dan Misi 6 ‘ **Meningkatkan tata Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital** ’ sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 didasarkan pada:

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya; dan
2. Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029

Dalam Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang inovatif dan berkelanjutan. Visi Kepala Daerah kabupaten Sidenreng Rappang ‘ Sidnreng Rappang Maju dan Sejahterah Misi 6 ‘ **Meningkatkan tata Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital dengan Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan inovatif Sasaran 11 Meningkatkan akutanbilitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif dengan indikator Indeks SPBE”**

Tujuan pembangunan Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu:

Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital. Transformasi layanan publik berbasis digital adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski menghadapi berbagai tantangan, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar jika dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5(lima) diuraikan pada tabel 3.3 berikut.

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN FINASL RENSTRA PD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Inovasi dan Digitalisasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi dan Meningkatnya Pelayanan Data Statistik dan Meningkatnya Keamanan Informasi		Indeks SPBE (poin)	3.04	3.06	3.08	3.2	3.5	3.8	4	
			Persentase Data Statistik yang Dipublikasikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Jumlah Aset Informasi Daerah yang Diamankan (%)	60	65	70	75	80	85	90	
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Kerjasama Media yang Dikelola (%)	64.45	70	77	82	88	93	100	
		Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	Persentase Luas Wilayah yang Tercoverage Jaringan Internet (%)	87.70	87.70	88	90	92	94	96	
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	59.25	62.10	65.40	69.90	71.88	73.02	80.11	
		Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia Pada Portal Satu Data Daerah (%)	40	50	60	70	80	85	90	
		Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Insiden Siber Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Kasus)	2	2	2	2	2	1	1	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 – 2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Dinas komunikasi dan Informatika

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pemetaan kebutuhan dan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).	Pemetaan kebutuhan dan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).	Interoperabilitas sistem antar OPD (satu data, satu aplikasi).	Mendorong inovasi berbasis data dan keterlibatan masyarakat.	Evaluasi keseluruhan capaian Renstra.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mendorong transformasi birokrasi pemerintahan agar **lebih responsif, transparan, efisien, dan akuntabel** dengan memanfaatkan **TIK secara optimal**. TIK menjadi alat strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta memudahkan pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data. Diuraikan pada table 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KPMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KET
1	2	3	4	5
		Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif berbasis teknologi digital melalui penyederhanaan proses birokrasi, penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Pengembangan sistem administrasi pemerintahan terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penguatan mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan inovatif	Penerapan Layanan SPBE di Instansi Pemerintah SDM yang memadai dan memiliki kompetensi IT terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif bagi pemerintah desa / kelurahan ketersediaan SDM yang memadai panduan dan prosedur tata kelola keamanan sistem informasi berbasis elektronik yang sesuai standar Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Subkegiatan adalah komponen terkecil dalam suatu kegiatan, yang memiliki alokasi anggaran dan target pencapaian yang spesifik serta memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030, diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / kota
 - 1.1. Relasi Media
 - 1.2. Penyusun konten
 - 1.3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
 - 1.4. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1.5. Diseminasi Informasi
 - 1.6. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 - 1.7. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - 1.8. Pelayanan Informasi Publik

- 1.9. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- 1.10. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota
 - 1.1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
 - 2.2. Pembangunan dan atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - 2.3. Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
 - 2.4. Keterhubungan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/ kota ke Jaringan Inytra Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2.5. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
 - 2.6. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - 2.7. Penyediaan Akses Internet untuk perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
 - 2.8. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - 2.9. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - 2.10. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab / Kota

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
 - Peningkatan Peran statistik sektoral terhadap Sistem nasional
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah
 - 1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - 1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupate/Kota
 - 1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- 1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.1. Operasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
 - 1.6. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Peralatan rumah tangga
 - 3.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - 3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Pengadaan Mebel
 - 4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4.3. penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 4.5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5.4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau

Bangunan lainnya

- 5.5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program, *output* kegiatan dan subkegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif sebagaimana tabel 4.1 dan 4.2 berikut

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

TABEL 4.1 PROGRAM DIMAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.287.104.000		6.612.151.700		6.379.967.868		6.469.752.496		6.637.738.734	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.178.358.000		3.280.905.700		3.320.721.868		3.404.506.496		3.572.492.734	
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.178.358.000	100	3.280.905.700	100	3.320.721.868	100	3.404.506.496	100	3.572.492.734	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.471.368.000		1.486.368.000		1.496.368.000		1.499.368.000		1.499.368.000	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	89	90	91	1.471.368.000	92	1.486.368.000	95	1.496.368.000	98	1.499.368.000	100	1.499.368.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.637.378.000		1.844.878.000		1.562.878.000		1.565.878.000		1.565.878.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	1.637.378.000	100	1.844.878.000	100	1.562.878.000	100	1.565.878.000	100	1.565.878.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					96.349.000		98.000.000		96.000.000		99.000.000		97.500.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					96.349.000		98.000.000		96.000.000		99.000.000		97.500.000	
Tercapainya, Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	100	96.349.000	100	98.000.000	100	96.000.000	100	99.000.000	100	97.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					127.002.000		114.251.000		118.251.000		131.251.000		122.251.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					127.002.000		114.251.000		118.251.000		131.251.000		122.251.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	55,97	64	65	127.002.000	66	114.251.000	67	118.251.000	68	131.251.000	69	122.251.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					6510455000.00		6824402700.00		6594218868.00		6700003496.00		6857489734.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

FINAL RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Inovasi dan Digitalisasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi dan Meningkatnya Pelayanan Data Statistik dan Meningkatnya Keamanan Informasi				Indeks SPBE (poin)		
					Persentase Data Statistik yang Dipublikasikan (%)		
					Persentase Jumlah Aset Informasi Daerah yang Diamankan (%)		
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa			Persentase Penyebarluasan Informasi dan Kerjasama Media yang Dikelola (%)		
					Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terlaksananya informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	Predikat Nilai Sakip (Angka)		
					Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Cakupan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan Jassa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	Tercapainya, Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Terlaksananya data statistik yang tersedia	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia Pada Portal Satu Data Daerah (%)		
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
					Jumlah Insiden Siber Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Kasus)		
		Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Perangkat Daerah yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030, diuraikan sebagai berikut:

2. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / kota
 - Relasi Media
 - Penyusun konten
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Diseminasi Informasi
 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab / Kota
 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
 - Koordinasi Pembangunan dan atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE
 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Akses Internet
 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota
- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

- Peningkatan Peran statistik sektoral terhadap Sistem nasional
- Pemenuhan prinsip satu data Indonesia
- Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
- Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan rumah tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan

lainnya

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program, *output* kegiatan dan subkegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif sebagaimana tabel 4.3 berikut

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.287.104.000,00		6.612.151.700,00		6.379.967.868,00		6.469.752.496,00		6.637.738.734,00			
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.178.358.000,00		3.280.905.700,00		3.320.721.868,00		3.404.506.496,00		3.572.492.734,00			
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.178.358.000,00	100	3.280.905.700,00	100	3.320.721.868,00	100	3.404.506.496,00	100	3.572.492.734,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.732.000,00		20.732.000,00		23.232.000,00		18.000.000,00		48.000.000,00			
Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4	20.732.000,00	4	20.732.000,00	4	23.232.000,00	4	18.000.000,00	4	48.000.000,00			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0		10		15		20		25						
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0		1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		1		1		1		1		1				
	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							5.732.000,00				5.732.000,00				5.232.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4	5.732.000,00	4	5.732.000,00	4	5.232.000,00	4	2.000.000,00	4	7.000.000,00			

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		3.000.000,00		8.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	8.000.000,00				
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00				
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00				
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					2.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0		1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	20.000.000,00				
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					2.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0		10	2.000.000,00	15	2.000.000,00	20	1.000.000,00	25	1.000.000,00		2.000.000,00				
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.323.112.000,00		2.367.510.700,00		2.416.326.868,00		2.434.343.496,00		2.448.829.734,00				
Cakupan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	317		330	2.323.112.000,00	350	2.367.510.700,00	367	2.416.326.868,00	378	2.434.343.496,00	385	2.448.829.734,00				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	1				1				1				1	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	5		5		5		5		5		5				
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.315.112.000,00		2.359.810.700,00		2.405.626.868,00		2.424.411.496,00		2.433.897.734,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	317		330	2.315.112.000,00	350	2.359.810.700,00	367	2.405.626.868,00	378	2.424.411.496,00	385	2.433.897.734,00			
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.000.000,00		2.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00			
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					6.000.000,00		5.700.000,00		3.700.000,00		2.932.000,00		7.932.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	5		5	6.000.000,00	5	5.700.000,00	5	3.700.000,00	5	2.932.000,00	5	7.932.000,00			
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.500.000,00		2.500.000,00		1.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00			
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		23	5.500.000,00	23	2.500.000,00	23	1.500.000,00	23	2.500.000,00	23	2.500.000,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1		1		1		1		1				
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					3.000.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1	3.000.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00			
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2.500.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		23	2.500.000,00	23	2.000.000,00	23	1.000.000,00	23	2.000.000,00	23	2.000.000,00		Page 56 66	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					260.500.000,00		327.649.000,00		328.149.000,00		331.149.000,00		331.149.000,00			
Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	260.500.000,00	4	327.649.000,00	4	328.149.000,00	4	331.149.000,00	4	331.149.000,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	12				12				12				12
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12				12				12				12
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		4				4				4				4
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00			
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.500.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	8.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00			
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00			
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					250.000.000,00		317.149.000,00		317.149.000,00		317.149.000,00		317.149.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	250.000.000,00	12	317.149.000,00	12	317.149.000,00	12	317.149.000,00	12	317.149.000,00			
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					32.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00			
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	3	32.000.000,00	3	30.000.000,00	3	31.000.000,00	3	24.000.000,00	3	26.000.000,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	1				1				1				1

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0					3							KAB. SIDENRENG RAPPANG		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					12.000.000,00		15.000.000,00		14.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00				
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	14.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00				
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00		15.000.000,00		14.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	3	20.000.000,00	3	15.000.000,00	3	14.000.000,00	3	13.000.000,00	3	15.000.000,00				
2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		3.000.000,00		0,00		0,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0,00		0,00	3	3.000.000,00		0,00		0,00				
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					358.000.000,00		354.000.000,00		354.000.000,00		429.000.000,00		428.000.000,00				
Cakupan Jassa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	358.000.000,00	12	354.000.000,00	12	354.000.000,00	12	429.000.000,00	12	428.000.000,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	12		12		12		12		12			12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			12		
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00				
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	78.000.000,00	12	78.000.000,00	12	78.000.000,00	12	155.000.000,00	12	155.000.000,00		Page 58 66		

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00			
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					270.000.000,00		266.000.000,00		266.000.000,00		264.000.000,00		263.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	270.000.000,00	12	266.000.000,00	12	266.000.000,00	12	264.000.000,00	12	263.000.000,00			
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					178.514.000,00		178.514.000,00		166.514.000,00		165.514.000,00		288.014.000,00			
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		15	178.514.000,00	11	178.514.000,00	11	166.514.000,00	11	165.514.000,00	11	288.014.000,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9		10		10		10		10		10				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		3		3		3		3		2				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		1		1		2				
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					114.790.000,00		114.790.000,00		114.790.000,00		114.790.000,00		234.790.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		15	114.790.000,00	11	114.790.000,00	11	114.790.000,00	11	114.790.000,00	11	234.790.000,00		Page 59 66	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.724.000,00		24.724.000,00		20.724.000,00		19.724.000,00		19.724.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9		10	24.724.000,00	10	24.724.000,00	10	20.724.000,00	10	19.724.000,00	10	19.724.000,00			
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					32.000.000,00		32.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00			
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	2	4.500.000,00			
2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		3	4.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	1.000.000,00	2	2.000.000,00			
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.471.368.000,00		1.486.368.000,00		1.496.368.000,00		1.499.368.000,00		1.499.368.000,00			
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	89	90	91	1.471.368.000,00	92	1.486.368.000,00	95	1.496.368.000,00	98	1.499.368.000,00	100	1.499.368.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.471.368.000,00		1.486.368.000,00		1.496.368.000,00		1.499.368.000,00		1.499.368.000,00			
Terlaksananya informasi dan komunikasi publik yang telah dikelolah	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	0	1	1.471.368.000,00	1	1.486.368.000,00	1	1.496.368.000,00	1	1.499.368.000,00	1	1.499.368.000,00			
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	0	15		15		20		20		30				
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	0	15		15		20		25		25				

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	3	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	0	4		4		4		4						
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminaskan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	0	2		3		2		3		1				
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	610	480	600		660		720		780		840				
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	0	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	24	25	2		3		3		3		3				
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	0	25		26		27		28		29				
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media					1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	3	3	3	1.100.000.000,00	3	1.100.000.000,00	3	1.100.000.000,00	3	1.100.000.000,00	3	1.100.000.000,00			
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminaskan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	0	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00	1	5.000.000,00		Page 61 6	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik					70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	24	25	2	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	80.000.000,00	3	83.000.000,00	3	83.000.000,00			
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	0	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	30	15.000.000,00			
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	0	25	5.000.000,00	26	5.000.000,00	27	5.000.000,00	28	5.000.000,00	29	5.000.000,00			
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	0	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00			
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik					27.368.000,00		27.368.000,00		27.368.000,00		27.368.000,00		27.368.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	0	0	5	27.368.000,00	5	27.368.000,00	5	27.368.000,00	5	27.368.000,00	5	27.368.000,00			
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten					229.000.000,00		244.000.000,00		244.000.000,00		244.000.000,00		244.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	610	480	600	229.000.000,00	660	244.000.000,00	720	244.000.000,00	780	244.000.000,00	840	244.000.000,00			
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	0	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00			
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.637.378.000,00		1.844.878.000,00		1.562.878.000,00		1.565.878.000,00		1.565.878.000,00			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	1.637.378.000,00	100	1.844.878.000,00	100	1.562.878.000,00	100	1.565.878.000,00	100	1.565.878.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00			
Terlaksananya domain dan sub domain yang dikelola	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	0	10	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	0	10	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00			
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.620.378.000,00		1.827.878.000,00		1.545.878.000,00		1.548.878.000,00		1.548.878.000,00			
Terlaksananya aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	40	41	60	1.620.378.000,00	60	1.827.878.000,00	60	1.545.878.000,00	60	1.548.878.000,00	60	1.548.878.000,00			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1	5	5				5				5				
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	0					1		2		3				

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0		2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	0	2		2		2		2						
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	5	5	2		2		2		2						
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	0	1		1		1		1						
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	0	1		1		1		1						
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	40	50	60		60		60		60						
	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional							0,00				0,00				
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	0		0,00		0,00	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00			
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00			
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	40	50	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00		Page 64 66	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi					5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	0	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00			
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					280.172.000,00		331.720.000,00		185.172.000,00		185.172.000,00		185.172.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1	5	5	280.172.000,00	5	331.720.000,00	5	185.172.000,00	5	185.172.000,00	5	185.172.000,00			
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					138.888.500,00		294.341.000,00		148.889.000,00		148.889.000,00		148.889.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	5	5	2	138.888.500,00	2	294.341.000,00	2	148.889.000,00	2	148.889.000,00	2	148.889.000,00			
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet					1.148.414.500,00		1.148.414.500,00		1.148.414.500,00		1.148.414.500,00		1.148.414.500,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	40	41	60	1.148.414.500,00	60	1.148.414.500,00	60	1.148.414.500,00	60	1.148.414.500,00	60	1.148.414.500,00			
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00			
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi					12.903.000,00		12.902.500,00		12.902.500,00		12.902.500,00		12.902.500,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0		2	12.903.000,00	2	12.902.500,00	2	12.902.500,00	2	12.902.500,00	2	12.902.500,00			
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					96.349.000,00		98.000.000,00		96.000.000,00		99.000.000,00		97.500.000,00			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					96.349.000,00		98.000.000,00		96.000.000,00		99.000.000,00		97.500.000,00			
Tercapainya, Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	100	96.349.000,00	100	98.000.000,00	100	96.000.000,00	100	99.000.000,00	100	97.500.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					96.349.000,00		98.000.000,00		96.000.000,00		99.000.000,00		97.500.000,00			
Terlaksananya data statistik yang tersedia	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0		1	96.349.000,00	1	98.000.000,00	1	96.000.000,00	1	99.000.000,00	1	97.500.000,00			
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	0	2		3		3		3		3				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0		30		40		60		65		68				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0		30								30				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		60		62		64		67						
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional					1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0		30	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00	30	1.000.000,00			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					63.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		63.000.000,00		64.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0		30	63.000.000,00	40	65.000.000,00	60	65.000.000,00	65	63.000.000,00	68	64.000.000,00			
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					22.500.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		27.000.000,00		21.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		60	22.500.000,00	62	23.000.000,00	64	23.000.000,00	67	27.000.000,00		21.000.000,00			
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					8.500.000,00		9.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0		1	8.500.000,00	1	9.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00			
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					1.349.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	0	2	1.349.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	3.000.000,00			
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					127.002.000,00		114.251.000,00		118.251.000,00		131.251.000,00		122.251.000,00			
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					127.002.000,00		114.251.000,00		118.251.000,00		131.251.000,00		122.251.000,00			
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	55,97	67	68	127.002.000,00	69	114.251.000,00	70	118.251.000,00	71	131.251.000,00	72	122.251.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					32.502.000,00		47.251.000,00		51.251.000,00		64.251.000,00		55.251.000,00			
Terlaksananya perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	4		1	32.502.000,00	1	47.251.000,00	1	51.251.000,00	1	64.251.000,00	1	55.251.000,00			

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2		1		1		1		1		1				
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	29	29	29		31		31		42		42				
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	4		1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00			
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		19.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2		1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	19.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					10.502.000,00		19.251.000,00		19.251.000,00		19.251.000,00		19.251.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	29	29	29	10.502.000,00	31	19.251.000,00	31	19.251.000,00	42	19.251.000,00	42	19.251.000,00		Page 68 66	

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					7.000.000,00		10.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1		1	7.000.000,00	1	10.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00			
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					94.500.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00			
Terlaksananya Perangkat Daerah yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	29	29	12	94.500.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00			
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					94.500.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	29	29	12	94.500.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00			

RANCANGAN RENSTRA
Tahun 2025-2029

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
FINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase Data Statistik yang Dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Jumlah Aset Informasi Daerah yang Diamankan	%	60	65	70	75	80	85	90	
3	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Kerjasama Media yang Dikelola	%	64,45	70	77	82	88	93	100	
4	Persentase Luas Wilayah yang Tercoverage Jaringan Internet	%	87,70	87,70	88	90	92	94	96	
5	Persentase Data Statistik Sektorial yang Tersedia Pada Portal Satu Data Daerah	%	40	50	60	70	80	85	90	
6	Jumlah Insiden Siber Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Kasus	2	2	2	2	2	1	1	
7	Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,22	3,42	3,62	3,84	4,07	4,31	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	55,97	67	68	69	70	71	72	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	89	90	91	92	95	98	100	
5	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Priorotas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	75,43	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03.2.01- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum	
			2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	

4.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan dalam Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan , Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah

4.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renstra Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN									
2.	Indeks SPBE	poin	3,04	3,06	3,08	3,2	3,5	3,8	4	
3.	Persentase Data Statistik yang Dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Jumlah Aset Informasi Daerah yang	%	60	65	70	75	80	85	90	
5.	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Kerjasama	%	64,45	70	77	82	88	93	100	
6.	Persentase Luas Wilayah yang Tercoverage Jaringan Internet	%	87,70	87,70	88	90	92	94	96	
7.	Predikat Nilai Sakip	Angka	59,25	62,10	65,40	69,90	71,88	73,02	80,11	
8.	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia Pada	%	40	50	60	70	80	85	90	
9.	Jumlah Insiden Siber Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis	Kasus	2	2	2	2	2	1	1	

4.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA										
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	positif	%	89	90	91	92	95	98	100	
4.	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Priorotas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	positif	%	75,43	100	100	100	100	100	100	
5.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
6.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	2.21- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
9.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	positif	%	55,97	67	68	69	70	71	72	

BAB V PENUTUP

Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.

Diperlukan komitmen yang kuat diperlukan dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029 Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijabarkan dalam dokumen Renja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditingkatkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut menjadi dasar penyusunan laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang pertanian dan pangan di masa yang akan datang. Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Pangkajene Sidenreng, September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. BACHTIAR, S.Hi., M.Si

Pangkat ; Pembina Tk. I

NIP. 197101221992031003